

TRANSPARANSI INFORMASI PORTAL RESMI PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI WEBSITE DALAM UPAYA PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK KOTA JAKARTA BARAT

RIFA NUR AIDA
NPP. 29.0610

*Asdaf Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email:

rifasanjoyo14@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research deals with how to transparency of local Government on the official portal of Government of West Jakarta City (barat.jakarta.go.id). The background underlying the writing of this is the openness of the information becomes the important thing at the moment and one of the demands of the community. **Objective:** As for the purpose of this research is to know the application of transparency on the portal of Government of West Jakarta City run by Sudinkominfo. **Method:** This study uses qualitative methods. The data collected through the study of librarianship and the study of the field. This study describes the application of transparency on the portal using the theory of web development at the company. Study of field observation is intended as well as in-depth interviews to the Manager. **Result:** The results of this research show that the application of transparency on the portal barat.jakarta.go.id categorized yet either. **Conclusion:** Because of the four principle used only one categorized Category easy access portals at barat.jakarta.go.id, while the other, namely availability of information, interaction opportunities, and public communication facilities are categorized is not good because there are still deficiencies in its application. So that future repair needs to be done in total so that portals can be better.

Keywords: *e-government, transparency, government portal*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan transparansi portal resmi pemerintah berbasis teknologi website dalam upaya pemenuhan pelayanan publik Kota Jakarta Barat (barat.jakarta.go.id). Latar belakang yang mendasari penulisan skripsi ini adalah keterbukaan informasi menjadi hal yang penting saat ini dan salah satu tuntutan dari masyarakat. **Tujuan:** Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi pada portal resmi Pemerintah Kota Jakarta Barat yang dikelola oleh Sudinkominfo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menjelaskan penerapan transparansi pada portal menggunakan teori transparansi pada portal. Studi lapangan yang dimaksudkan adalah observasi serta wawancara yang

mendalam kepada pengelola. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada portal barat.jakarta.go.id dikategorikan belum baik. **Kesimpulan:** Karena dari empat prinsip yang digunakan hanya satu yang dikategorikan baik yaitu kategori kemudahan dalam mengakses barat.jakarta.go.id, sedangkan tiga lainnya yaitu ketersediaan informasi, kesempatan berinteraksi, dan fasilitas komunikasi publik dikategorikan tidak baik karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapannya. Sehingga kedepannya perbaikan perlu dilakukan secara total agar portal dapat menjadi lebih baik.

Kata kunci: e-government, transparansi, portal pemerintah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Website Pemerintah atau portal pemerintah kota yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kualitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota, seperti menampilkan postur anggaran daerah setiap tahunnya, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai salah satu aspek akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dapat diupload pada *website*, agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran daerah oleh para pejabat daerah. Hampir semua pemerintah daerah kabupaten/ kota telah menampilkan postur anggarannya dan hasil pemeriksaan BPK RI ke dalam *website* milik pemerintah daerah masing-masing.

Data Hasil Survey Ranking E-Government Portal Pemerintah Indonesia tahun 2020



The image shows a screenshot of the UN E-Government Knowledgebase website. The page features a 'Country Selector' section with a dropdown menu set to 'Indonesia'. Below this is a world map with Indonesia highlighted in green. To the right, a table displays various indicators for Indonesia, including website type, region, income, population, and e-government indices.

UN E-Government Knowledgebase		ABOUT
Country Selector		
View Country Data		
Select a country to view its data profile.		
Select Country		
Indonesia		
Website	National Portal	
Region	Asia	
Sub-Region	South-eastern Asia	
Income *	Lower middle income	
Income Value	3,540 USD, GNI per capita	
Population	258,162,113	
E-Government Development Index	0.6612 Rank 88 of 193	
E-Participation Index	0.7500 Rank 57 of 193	

Sumber : <https://ppid.menpan.go.id> tentang hasil survey e-gov tahun 2020

Hasil survey yang didapatkan di halaman layanan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 mengenai penggunaan portal website yang digunakan oleh seluruh pemerintah di Indonesia sebagai perwujudan *e-government*. Indonesia meraih peringkat 88 dari 193 negara dalam penggunaan portal resmi pemerintah, dan menduduki peringkat 57 peraih partisipasi masyarakat terhadap kebutuhan akan informasi publik.

Menurut data kurangnya pemanfaatan media elektronik dalam memperoleh informasi publik sangat jelas. Permasalahan lainnya adalah banyak data yang belum diupgrade. Dibuktikan melalui data yang diambil oleh penulis menunjukkan tahun 2018 padahal diakses pada tahun 2020. Kenyataan selanjutnya adalah sulitnya mengakses data banyak data yang tersaji tetapi hanya halaman data saja. Berikut adalah data pengguna Internet dan data pengunjung portal resmi pemerintah Kota Jakarta Barat. Peran pemimpin juga mempengaruhi dari perolehan data yang tersaji. Pemimpin punya peran penting dalam mengintegrasikan OPD wilayah Kota Jakarta Barat agar cepat mengirimkan data. Pada saat melihat data yang ingin penulis ambil masih belum tersaji data yang terbaru dan penyajian data masih tahun 2019. Sesuai data data penggunaan internet Kota Jakarta Barat yaitu mencapai 1.275.497 jiwa dimana penggunaan internet ini salah satu pemanfaatan teknologi sesuai dengan Instruksi Presiden No 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (Covid-19). Adanya virus covid membuat penyempitan anggaran sehingga berimbas pada anggaran Sudin Kominfotik dengan penghapusan anggaran sosialisasi luar ruang seperti bener dan spanduk lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Menurut UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh Informasi, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana, ketiga pengecualian bersifat ketat dan terbatas, keempat kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Penggunaan internet membantu pemerintah untuk dapat terbuka mengenai informasi yang dapat diakses publik, namun data menunjukkan bahwa pengguna internet di Kota Jakarta Barat 1.275.497 pengguna. Sangat berbeda dengan pengunjung portal website perharinya hanya 200-300 pengunjung. Masyarakat kurang membuka halaman web jika dibandingkan jumlah penduduk Kota Jakarta Barat yang mencapai 2,585,144 jiwa. Peneliti akan menguraikan laporan mengenai masalah : (1) OPD yang dinilai masih lambat dalam memberikan data secara cepat kepada Dinas Komunikasi dan Informasi serta karena tidak dibuatnya aturan yang mewajibkan setiap OPD untuk memberikan laporan; (2) Sumber Daya Manusia yang masih belum maksimal dalam hal kualitas kerja; (3) Banyak data yang tersedia hanya halamannya semata sehingga masyarakat tidak mendapat data yang sesuai dengan yang diinginkan Penggunaan teknologi tersebut masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang menyalurkan aspirasi mereka melalui media sosial daripada melalui portal resmi Pemerintah; (4) Minimnya sosialisasi dan kurangnya anggaran pada Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jakarta Barat sehingga melemahkan minat masyarakat terhadap portal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Oktari yang berjudul Analisis Penerapan Transparansi Pada Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) (Oktari, 2005), menemukan bahwa.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, berlandaskan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimana salah satu dari tujuan UU KIP adalah untuk mewujudkan sistem yang

transparans sebagai wujud pemerintahan yang baik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik, dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini diangkatlah judul mengenai transparansi informasi portal resmi pemerintah di Kota Jakarta Barat dimana untuk mengimplementasinya harus didukung dengan komitmen semua elemen pemerintahan dalam menjalankan UU KIP. Demi Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik erat kaitannya dengan pelayanan publik. Secara korelasi, jika pelayanan publik itu baik, maka penyelenggaran negara juga bisa berjalan dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Barat ntuk mengatasi hambatan terselenggaranya ttransparansi pemerintah dalam pelaksanaannya selama ini sudah baik namun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya sebagaimana yang tertera dalam kerangka pemikiran di atas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi informasi Kota Jakarta Barat dalam pemenuhan ketersediaan informasi publik. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat terlaksananya transparansi informasi publik pada portal resmi Kota Jakarta Barat dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas website pemerintah Kota Jakarta Barat dalam ketersediaan informasi publik.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan penulis dengan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari sumber- sumber primer yaitu informasi dari narasumber. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* ialah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu (Arikunto: 2006).

Data Informan Magang Riset Terapan Pemerintahan

NO	Jabatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jakarta Barat	1
2	Kasi Komunikasi dan Informasi Publik	1
3	Pengelola portal Website Kota Jakarta Barat	1
4	Masyarakat Pengguna Portal	3

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber, 2021

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Transparansi Informasi Pada Portal Resmi Pemerintah Kota Jakarta Barat

Tujuan dasar ketersediaan informasi publik adalah mewujudkan pemerintahan yang transparan dan terbuka. Menurut Eschenfelder & Miller (2005:8), indikator ketersediaan informasi mengacu kepada jumlah informasi dan jenis informasi yang tersedia pada portal pemerintah.

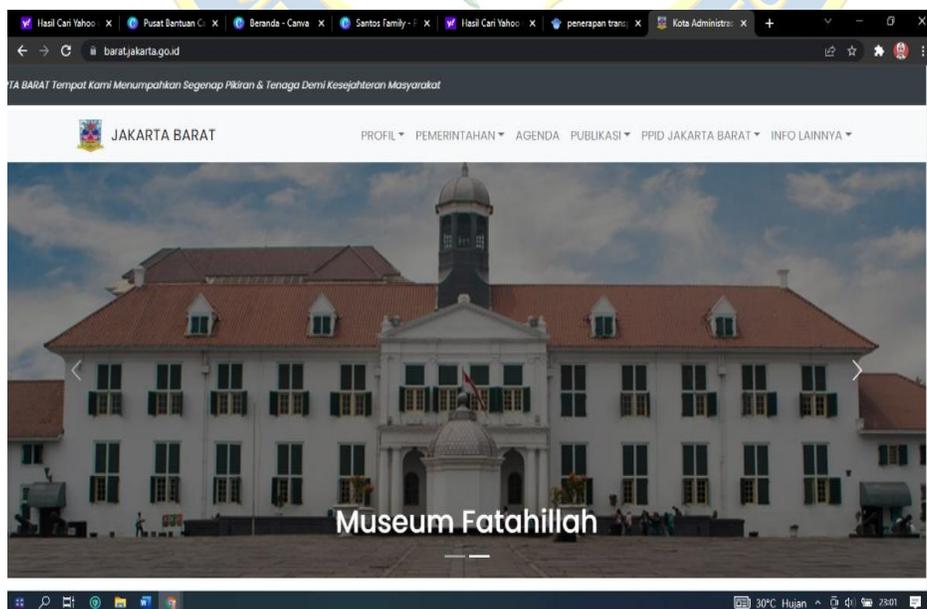
3.2 Ketersediaan Informasi pada Portal barat.jakarta.go.id

Ketersediaan informasi merupakan suatu hal yang menunjang transparansi suatu Informasi. Menurut UU KIP Pasal 6 dimana di dalamnya memuat tentang informasi yang dikecualikan.

- a. Pengecualian substansial
Pengecualian Substansial merupakan informasi atau data yang tidak boleh diberikan kepada masyarakat atau publik karena secara substansial informasi dan data tersebut termasuk ke dalam kategori yang harus dirahasiakan berdasarkan Undang-undang.
- b. Pengecualian procedural
Pengecualian prosedural merupakan informasi yang secara substansialnya terbuka tetapi tata cara pemberian data atau informasinya diatur sesuai prosedur khusus peraturan perundang-undangan.
- c. Kemudian dalam pasal 6 UU KIP juga memuat beberapa peraturan yang mengatur tentang pemberian informasi

Informasi selanjutnya adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala minimal dalam kurun waktu 6 bulan sekali. Informasi berkala ini juga dapat diperoleh jika ada pemohon untuk meminta data. Pada portal barat.jakarta.go.id ada beberapa laporan yang termasuk laporan berkala seperti laporan keuangan pertahunnya, laporan operasional yang dimana dalam pengelolaan data informasinya dapat berubah-ubah, berikut ini yang termasuk dalam informasi berkala yaitu:

- a. Informasi tentang profil Kota Jakarta Barat
Portal barat.jakarta.go.id menyediakan informasi terkait profil Pemkot Jakarta Barat, seperti pada fitur konten berikut ini:



Fitur Informasi Profil Pemerintah Kota Jakarta Barat

Sumber: Portal barat.jakarta.go.id 2022

b. Informasi terkait rencana kerja

Informasi lainnya yang wajib disediakan pada portal pemerintah adalah informasi program kerja pemerintah. Informasi program atau rencana kerja disediakan pada portal barat.jakarta.go.id terlihat pada gambar berikut ini:

Rencana Kegiatan Program penyelenggaraan administrasi, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan sarana-prasarana PPID Kota Administrasi Jakarta Barat

NO.	NAMA KEGIATAN	Volume kegiatan	JML	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Rapat Koordinasi & Evaluasi Tim pelaksana PPID (minimal 3 bulan sekali)	4	20 Orang	■											
2	Pengiriman delegasi/perwakilan dalam bimtek keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan PPID Utama/pihak luar	2	Orang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Pembelian Hardisk eksternal sebagai media penyimpan data Informasi Publik	1	Unit	■											
4	Cetak, Penjilidan dan fotocopy dokumen PPID	1	Paket	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Pembuatan Video, banner, Buku profil PPID, sticker media sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik	1	Paket	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Camera digital Go Pro	1			■										
7	Bimtek Klasifikasi Informasi Publik (menghadirkan narasumber ahli komisioner KIP & akademisi)	1			■										
Total															

Informasi Rencana Kerja dalam Portal

Sumber: ppid kota Jakarta Barat dalam portal barat.jakarta.go.id

c. Informasi Keuangan Daerah

Portal barat.jakarta.go.id melalui aplikasi informasi anggaran belanja telah menyediakan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Jakarta Barat. Informasi yang disediakan adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021.

d. Informasi Terkait hukum dan Regulasi Pemerintah Kota

Informasi tentang peraturan dan kebijakan pemerintah juga telah disediakan pada aplikasi produk hukum. Produk hukum merupakan informasi yang selalu di-update dan diperbarui oleh pengelola portal barat.jakarta.go.id karena merupakan informasi utama yang paling banyak diakses oleh masyarakat.

Portal barat.jakarta.go.id menyediakan link ke situs web Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, PPID, Aplikasi Sistem Kepegawaian (SIMPEG), Jakarta Barat Informasi Hukum (JBIH), Open Data, WalikotaFarm 4.0, dan Jakarta Satu akan tetapi, portal barat.jakarta.go.id masih minim dalam menyediakan link ke website Satuan Kerja Peringkat Daerah (SKPD) karena tidak menyediakan link ke situs Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu tujuan portal adalah menyediakan berbagai macam informasi di seluruh agensi pemerintahan yang ada di lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa portal barat.jakarta.go.id belum dapat disebut sebagai *integrated portal* karena belum menyediakan link ke situs web dengan lengkap terutama ke unit-unit kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

3.3 Kemudahan Akses Informasi pada Portal barat.jakarta.go.id

Kemudahan dalam mengakses portal didalamnya terdapat aspek-aspek kemudahan portal dinilai dari format penyajian informasi dan kemudahan untuk menggunakan menu-menu yang tersedia pada portal barat.jakarta.go.id. Hal terpenting lainnya dalam menyediakan informasi secara *online* adalah kemudahan untuk menemukan portal. Portal dengan fungsi yang sesuai, itu artinya portal tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat meningkatkan nilai nilai transparansi pada portal barat.jakarta.go. id sendiri. Terdapat 15 subindikator kemudahan akses informasi pada portal barat.jakarta.go.id telah memenuhi 11 subindikator. Hal ini memperlihatkan bahwa portal telah mudah digunakan (*user friendly*) sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. secara keseluruhan portal telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mencari dan mengakses informasi yang tersedia pada portal barat.jakarta.go.id. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan misalnya dalam hal desain yang terbaru pada portal barat.jakarta.go.id belum disempurnakan dan dalam tahap proses pembaruan. Penerapan transparansi pada portal adalah harus mudah diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Aksesibilitas disini mengacu kepada kemampuan untuk mengakses konten yang ada pada *website* (Bertot *et al*, 2010:268). Portal yang efektif dalam memberikan informasi seharusnya tidak membatasi semua pengguna untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan hasil pengamatan, barat.jakarta.go.id belum menyediakan akses kepada pengguna yang berkebutuhan khusus karena tidak menyediakan konten audio bagi mereka yang menderita kelemahan pendengaran dan konten visual bagi mereka yang memiliki kelemahan penglihatan. Hal ini penting diperhatikan karena *website* pemerintah harus sepenuhnya dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat khususnya masyarakat Kota Jakarta Barat.

3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi pada Portal barat.jakarta.go.id

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat transparansi informasi portal resmi Kota Jakarta Barat yaitu sebagai berikut:

- a. Regulasi dan koordinasi yang lemah terkait keterbukaan informasi pada Koordinasi UKPD yang masih rendah terkait kriteria informasi Publik yang bisa dikonsumsi oleh Umum.
- b. SDM dan Kompetensi serta kualitas pegawai yang lemah
- c. Teknologi yang digunakan masih minim
- d. Sosialisasi dan promosi yang terkendala anggaran
- e. Rendahnya kesadaran dan minat masyarakat terkait portal Jakarta Barat

3.5 Upaya yang Dilakukan dalam Pengembangan Portal

Upaya yang dapat diterapkan penulis dan Suku Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

- a. Walikota membuat regulasi terkait kewajiban OPD untuk mengirimkan data.
- b. Perekrutan pegawai yang sesuai kompetensi dan keahlian khusus sesuai bidangnya, serta adanya pemberian *reward* dan *punishment* dalam lingkungan kerja organisasi.
- c. Pengembangan dan perbaikan pada Portal dengan membuat re-desain dari tampilan website kini menuju proses penyempurnaan ke fitur mobile.
- d. Memanfaatkan link terkait untuk promosi portal.
- e. Menambah infografis dan membuat outline yang menarik untuk meningkatkan tingkat minat akses masyarakat.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penggunaan website resmi pemerintah Kota Jakarta Barat sebagai sarana pelayanan publik yang dilakukan di Kota Jakarta Barat merupakan bentuk dari pelayanan informasi publik dimana keterbukaan mengenai informasi harus terus dilakukan. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jakarta Barat guna untuk mempermudah masyarakat

dalam urusan pelayanan pemerintahan karena dapat diakses dimanapun melalui website resmi pemerintah barat.jakarta.go.id Tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk website barat.jakarta.go.id sendiri belum dikatakan baik dalam proses pelayanan dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas. sedangkan pada penelitian sebelumnya mengatakan bahwa website sebagai pelayanan publik belum dikatakan efektif, karena masih ada terdapat kendala seperti masyarakat yang kurang mengetahui mengenai website tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penerapan transparansi pada portal resmi Pemerintah Kota Jakarta Barat pada barat.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik karena dari keempat indikator yang digunakan hanya satu yang dikategorikan baik. Kemudian ada Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id, yaitu terdiri dari (1) proses birokrasi dan koordinasi antar SKPD yang masih lamban, (2) masih rendahnya pemahaman SKPD terkait kriteria informasi publik, (3) proses sharing data yang masih manual, (4) rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, (5) promosi dan sosialisasi yang masih minim. Dengan adanya faktor faktor penghambat tersebut maka ada upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Jakarta Barat yaitu terkait re-desain portal, membuta fitur infografis yang menarik, dan kegiatan promosi melalui media sosial lainnya yang dapat mencantumkan link portal barat.jakarta.go.id dimana promosi tersebut merupakan bentuk survive Sudinkominfotik Jakarta Barat karena keterpurukan pandemi covid dan minimnya anggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan penelitian sehingga kurang maksimalnya penelitian dilakukan. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari penelitian ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan maka dari itu diharapkan adanya penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan penggunaan website barat. Jakarta.go.id sebagai sarana pelayanan publik di Kota Jakarta Barat agar memperoleh hasil yang lebih baik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Orang Tua, Keluarga, Kak Bina dan, teman-teman seluruh pihak terkait yang mengizinkan saya melakukan penelitian ini serta seluruh dosen yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Subagyo 2010, *Marketing In Business*. pertama, cetakan pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Amir Hartman, John Sifonis, and John Kador. Net Ready - Strategies for Success in the E-conomy. McGraw-Hill, New York, 2000.pertama
- Dwiyanto, A. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.Dwiyanto , A, 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Eschenfelder, Kristin R., & Clark. A Miller. 2007. E Examining the role of Website information in facilitating different citizen-government relationship: A case study of state Chronic Wasting Disease Website. *Government Information Quarterly*, 24,64-88.
- Ghiani, G., Laporte, G. & Musmanno, R. 2004. *Introduction to Logistic Systems Planning and Control*. John Wilet & Sons.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Milles dan Huberman. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. UI Pers.
- Narimawati, Umi, S. D. A. dan L. I. 2010. *Panduan Awal menyusun Skripsidan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Penerbit Genesis.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja.

Publikasi Ilmiah

- Bertot, J. C. & P. T. J. 2006. User-centered e-government: Challenges and benefits for government Web sites. *Government Information Quarterly*,23, 163– 168.
- Gant, Jon P., & D. B. G. 2002. Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences. *Web Portal Functionality and State Government E-Service*.
- Gronlund, Ake 2007, *Electronic Government*, pada: Anttiroiko, Ari-Veko and Matti Malkia (eds.), *Encyclopedia of Digital Government, Volume I*,Hershey: Idea Group reference.
- Hayden-roy, P. A. 2003. *Refining the Metaphor in Lessing ' s Erziehung des Menschengeschlechts*.
- Oktari, R. 2012. *Analisis Penerapan Transparansi Pada Portal Resmi Pemerintah Provinsi Dki Jakarta* [Universitas Indonesia]. Wwww.Jakarta.Go.Id
- Ribeiro. 2011. Non pharmacological Treatment of Hypertension in Primary Health Care: A Comparative Clinical Trial of Two Education Strategiesin Health and Nutrition. *BMC Public Health*, 11(637).<http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/637>
- Scott, J. K. 2005. Assessing the Quality of Municipal Government Web Sites. *State and Local Government Review*, 37(2), 151–165.
- Scott, J. K. 2011. Assessing the quality of web sites. *Applied Computing and Informatics*, 9(1), 11–29.

Peraturan

SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2011. *Lokakarya Peningkatan Kompetensi Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Telematika Dan Komunikasi Publik*.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor *Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah*. 2012. 188.52/179.
Instruksi Presiden. (n.d.). No.6/ 2001.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia *Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika*. 2019. 8.
Undang-undang keterbukaan informasi. 2008. 14.
Undang-Undang Pelayanan Publik. 2009. Nomor 25.
Undang-Undang Pemerintah Daerah. 2014. Nomor 23

Internet

laporan terakhir Satu Data 2018. (n.d.). <https://barat.jakarta.go.id>
tentang hasil survey e-gov tahun 2020. (n.d.). <https://ppid.menpan.go.id>

